BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Gerakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, berikut adalah raian sejarah terbentuknya Gerakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat :

A. Masa Persiapan

1. 14 Nopember 1953

Di bawah pimpinan dan pengambil inisiatf Rd.Hasan Nata Permana, Anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Propinsi Jawa Barat, berkumpulah semua Kepala Jawatan.

Pokok Pembicaran : Upaya meringankan beban hidup para Pegawai Negeri dari tekanan ekonomi.

2. 6 Maret 1954

19 orang berkumpul untuk membentuk sebuah koperasi primer yang diberi nama : KOPERASI KESEDJAHTERAAN PEGAWAI (KKP).

Terpilih sebagai Pengurus, yaitu :

a) Ketua : Rd.Hasan Nata Permana

b) Wakil Ketua : Moh. Ahyar

c) Penulis I : Enoeng Taria

d) Penulis II : Hawadi

e) Bendahari : Moh. Nawawi

f) Komisaris : J. Soedjanaprawira

g) Komisaris : Sjamsu Sumahadidjadja

h) Komisaris : R.D.Admihardja

i) Komisaris : Ch.J.Reemer

Karena KKP merupakan koperasi primer, maka upaya untuk meminta agar wilayah kerjanya meliputi seluruh Propinsi Jawa Barat dan menggabungkan diri kepada Pusat Koperasi yang ada (Pusat Koperasi Kabupaten dan Kotapradja) DITOLAK/TIDAK DITERIMA.

B. Saat Lahirnya

PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (PKPN) DJAWA BARAT

1. 1 Juli 1954

Lahirlah Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) yang daerah kerjanya meiputi seluruh Propinsi Jawa Barat, dengan susunan Pengurusnya yang pertama :

a) Ketua : Rd.Hasan Nata Permana (KKP yang dibubarkan)

b) Wakil Ketua : M. Soemarna (KGG Garut)

c) Sekertaris : Enoeng Taria (KKP yang dibubarkan)

d) Bendahari : R.D. Admihardja (KKP yang dibubarkan)

e) Komisaris : Sjamsudin (KPU Garut)

2. 12 Juli 1954

Hari Senin tanggal 12 Jul 1954 jam 11.00 adalah tanggal yang amat bersejarah bagi PKPN Jawa Barat karena pada hari itulah terbentuknya PKPN Jawa Barat diresmikan dan Pengrusnnya dilantik.

i. Kantor meumpang pada Kantor Pekerjaan Umum Propisi Jawa Barat dalam ruangan yang berukuran 4 x 6,8 M di Jalan Asia Afrika 79 Bandung.

ii. Usaha pertama berupa gula pasir yang didapat langsung dari Nivas sebanyak 100 ton dengan harga Rp.300.000,-

C. Pembetukan Badan koordinasi PKPN Seluruh Indonesia (Sekarang IKPRI)

Pemutusan kehendak dan keperluan untuk mengkoordinir kkehendak itu menjelma dalam pembentukan BADAN KOORDINASI PKPN-PKPN SELURUH INDONESIA yang berkedudukan di jakarta di bawah pimpinan (bean Menteri Sosial) R.P.Suroso dan R.Hasan Nata Permana (Ketua PKPN Jawa Barat).

Pada Kongres taggal 19-22 Nopember 1958, dimana PKPN Jawa Barat sebagai penyelenggara kongres, maka Badan Koordinasi

disetujui oleh kongres untuk dialihkan menjadi suatu badan koperasi dengan nama "GABUNGAN PKPN-PKPN SELURUH INDONESIA" dengan susunan pengurus :

Ketua : R.P. Suroso (Jakarta)

Wakil Ketua I : R.Hasan Nata Pemana (Bandung)

Wakil Ketua II : R.HSamadikun (Surabaya)

Sekr.Jendral : R. Subijato (Jakarta)

Bendahari : J.W.R. Loing (Jakarta)

Pembantu : G. Hutapea (Jakarta)

Pembantu : Karamoy (Palembang)

D. Perubahan Anggaran Dasar

Berhubung dengan perubahan UU Koperasi No.179 tahun 1949 menjadi UU Koperasi No.79 tahun 1958, maka Anggaran Dasar (AD) PKPN Jawa Barat harus menyesuaikan diri dengan UU Koperasi yang baru. Akta perubahan AD tsb disahkan oleh Kepala Jawatan Koperasi Pusat dan terdaftar tanggal 23 Oktober 1959 No. 1016 A. Kemudian Akta perubahan AD ini diganti kembali menjadi No. 1016 B tanggal 18 Januari 1961.

E. RTA Ke-6 Di Sindanglaya Ciajur Tanggal 20-22 Juni 1960

Menyetujui penyesuaian Koperasi Pusat PKPN Jawa Barat dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 dan Karena itu mengubahnya

menjadi GABUNGAN PUSAT-PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (GKPN) Jawa Barat.

F. Perubahan Nama GKPN Jawa Barat Menjadi GKPRI Jawa Barat

1. Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 7 April 1995 nomor : 1016D/BH/PAD/KWK 10/IV/1995
2. Menyesuaikan dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, dilakukan perubahan Anggaran Dasar menjadi nomor : 1016/BH/PAD/KWK 10/IX/1997 Tanggal 29 September 1997.
3. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan No. Badan Hukum : 04/PAD/XIII/518-DISKOP.UMKM/X/2010 Tanggal 4 Oktober 2010.

2.1.1 Landasan Operasional

1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Barat.
3) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja GKPRI Provinsi Jawa Barat.

2.1.2 Visi, Misi. Moto dan Logo

1. Visi

Terwujudnya GKPRI Jawa Barat sebagai wahana pendukng pem-bangunan perekonomian masyarakat Jawa Barat, khususnya para anggota koperasi, serta terwujudnya hubungan hirarkis antar lembaga dan jiwa kewirakoperasian, melalui azas kebersamaan dan kekeluargaan.

2. Misi

1) Berperan aktif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anggotaa melalui optimalisasi potensi dan sumber daya yang tersedia.

2) Berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, sehingga mampu mendukung profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan pegawai Republik Indonesia kepada masyarakat.

3) Berupaya meningkatkan kemampuan dn kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia, baik langsung maupun kerjasama dengan lembaga lain, secaraa hirarkhis.

C. Moto : Sauyunan Pikeun Karaharjaan.

D. Logo

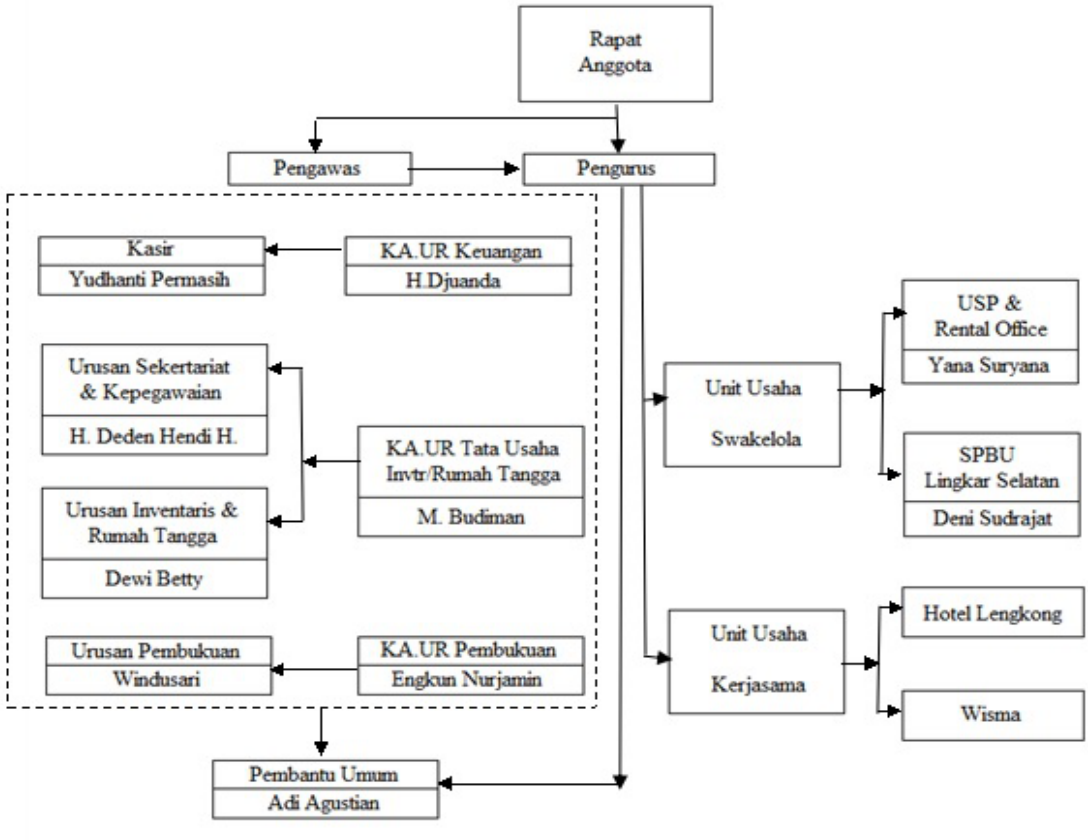


Gambar 2.1

Logo Perusahaan

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut adalah Struktur Organisasi pada perusahaan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat secara umum.



Gambar 2.2

Struktur Organisasi GKPRI Jawa Barat

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada struktur organisasi Gerakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. KA.UR.Keuangan
    a. Melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan koperasi yang baru untuk dikembangkan.
    c. Melakukan kegiatan administrasi keuangan koperasi (Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Koperasi) baik rutin maupun pembangunan.
    d. Melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh pengurus koperasi.
2. Kasir
    a. Bertanggung jawab atas dana kas kecil
    b. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang
    c. Bertanggung jawab membuat laporan harian
3. KA.UR.Tata Usaha INVTR/Rumah Tangga
    a. Pelaksanaan Urusan perlengkapan dan inventaris koperasi

b. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas dan rumah tangga koperasi

c. Penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara

d. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan koperasi

e. Pengumpulan bahan dan penyusuna laporan pengawas

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengawas sesuai dengan tugas dan fungsi

g. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh koperasi (pph pasal 21, pph pasal 25, PBB) dan membantu kegiatan pencatatan pajak rumah tangga serta pajak lainnya.

4. Urusan Sekretariat dan Kepegawaian

a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian

c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat

d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

5. Urusan Inventaris dan Rumah Tangga

    a. Melakukan rekapitulasi permohonan ATK dari unit kerja

    b. Merencanakan pemesanan dan pengadaan ATK kepada rekanan

    c. Mencatat penerimaan dan pendistribusian ATK

    d. Membuat laporan ATK secara berkala

6. KA.UR.Pembukuan

    a. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib

    b. Memelihara Daftar Buku Anggota, Daftar Buku Pengurus, dan Daftar Buku Pengawas

    c. Mengatur jalannya pembukuan keuangan

    d. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha.

    e. Bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

7. Urusan Pembukuan

    a. Menyusun anggran setiap bulan.

    b. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.

    c. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi.

    d. Menyusun laporan keuangan.

    e. Mengendalikan anggaran.

8. Pembantu Umum

   a. Membuka, dan membersihkan ruangan setiap hari

   b. Membersihkan dan Menutup ruangan setiap hari

   c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kebersihan

   d. Melakukan stok opnam barang setiap akhir bulan

   e. Membantu membeli konsumsi pengurus dan karyawan

   f. Membantu pengurus untuk melaksanakan tugas yang mendesak

2.4 Kegiatan Perusahaan

Jenis usha berdasarkan cara pengelolaanny unit - unit usah GKPRI Jawa Barat ada yang diusahakan sendir (swakelola) ada yang dikerjasamakaan.

Usaha yang dilaksanakan oleh GKPRI Jawa Barat yang swakelola yaitu :

1) Unit Simpan Pinjam (USP)

2) SPBU Lingkar Selatan

3) Rental Office

Sedangkan yang dikerjasamakan yaitu :

1) Hotel Lengkong

2) Wisma

Dari usaha yang diaksanakan diatas, dapat dikelompokn kedalam:

1) Unit Kantor Pusat

2) Unit Simpan Pinjam (USP)

3) Unit SPBU Lingkar Selatan